

**ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN UNTUK DANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG  
PERIODE 2010-2014.**

**Fiqih Pradana  
Mochammad Al Musadieg  
Zahro ZA**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Email : [125030400111127@mail.ub.ac.id](mailto:125030400111127@mail.ub.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study is motivated by the revenue receipt of (Motor Vehicle Tax) and (Customs of Motor Vehicle) Profit Sharing of Malang City that is increased and decreased over the period 2010-2014 by seeing its contribution to regional development fund. The method used is qualitative method descriptive research, using observation and documentation as the tools of data collection. The conclusion obtained from this study is that the realization of revenue of the Motor Vehicle Tax and Customs of Motor Vehicle Profit Sharing has reached the defined target despite there is unreachable target in certain year. The growth rate of revenue of Motor Vehicle Tax Profit Sharing has increased and decreased, but revenue growth of Customs of Motor Vehicle Profit Sharing experiences a steady increase, the level of local financial dependence of Malang City is rated so high on revenue of Motor Vehicle Tax and Customs of Motor Vehicle Profit Sharing. Contribution of revenue of Motor Vehicle Tax and Customs of Motor Vehicle Profit Sharing is so high for regional development fund of Malang City.*

**Keyword : the revenue of Motor Vehicle Tax and Customs of Motor Vehicle, regional development fund, Contribution**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerimaan Bagi Hasil sektor Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota Malang yang mengalami peningkatan dan penurunan selama periode 2010-2014 dengan melihat kontribusinya untuk dana Pembangunan Daerah. Metode penelitian yang dipilih yaitu metode kualitatif deskriptif, sebagai alat pengumpulan datanya menggunakan observasi serta dokumentasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah mencapai target meskipun ada ketidaktercapaian di tahun tertentu. Pertumbuhannya mengalami peningkatan dan penurunan, akan tetapi pendapatannya mengalami peningkatan yang stabil, tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Malang dinilai sangat tinggi. Kontribusi pendapatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB dinilai sangat tinggi untuk dana pembangunan daerah Kota Malang.

**Kata Kunci : Bagi Hasil Pajak, Pembangunan Daerah, Kontribusi  
PENDAHULUAN**

Pembangunan adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan dapat diartikan segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas manusia. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan.

Daerah otonom dituntut untuk mendanai daerahnya sendiri melalui penerimaan yang diperoleh daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lainnya. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintah dan pembangunan karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Pajak Daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Beberapa fungsi pajak yang

berhubungan dengan sumber pembangunan daerah :

- 1. Fungsi *Budgetair*
- 2. Fungsi *Regulerend*
- 3. Fungsi Redistribusi

Pelaksanaan fungsi-fungsi diatas salah satunya dapat dilihat dari diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah. Dasar hukum dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari APBN berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Bagi Hasil PKB serta BBNKB merupakan penerimaan besar bagi daerah. Realisasi pendapatan Bagi Hasil PKB serta BBNKB yang diterima Kota Malang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan daerah sehubungan dengan pembangunan daerah. Di bawah ini merupakan Bagi Hasil PKB dan BBNKB di Kota Malang selama periode 2010-2014 :

Tabel 1. Bagi Hasil PKB dan BBNKB.

Tahun	Bagi Hasil PKB	Bagi Hasil BBNKB
2010	Rp. 42.026.989.666,00	Rp. 26.675.560.571,00
2011	Rp. 29.680.291.144,00	Rp. 21.511.263.352,00
2012	Rp. 53.190.971.687,00	Rp. 29.797.468.282,00
2013	Rp. 40.068.051.532,00	Rp. 37.986.052.946,00
2014	Rp. 59.573.861.821,00	Rp. 53.233.946.429,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (2014). Dari tabel diatas apat dilihat peningkatan dan penurunan pada tahun tertentu terjadi pada pendapatan Bagi Hasil PKB serta BBNKB Kota Malang mengalami.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui mengenai kontribusi pendapatan Bagi Hasil PKB serta BBNKB serta kontribusinya untuk dana pembangunan daerah dalam kurun waktu 2010-2014 dengan mengambil judul **“Analisis Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Dana Pembangunan Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang tahun 2010-2014)”**.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan perundangan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Berdasarkan definisi tersebut, menunjukkan bahwa pajak prinsipnya adalah masyarakat diminta menyerahkan sebagian

hartanya untuk membiayai keperluan negara demi kepentingan bersama.

Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapat imbalannya secara langsung demi kepentingan bersama berdasarkan peraturan perundangan perpajakan.

Pajak Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu daerah, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah terlebih dengan makin kuatnya kedudukan daerah yang bersifat *autonom* sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Bagi Hasil Pajak (KB) dan Bea Balik Nama (KB)

Dana Bagi Hasil (Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari APBN berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Bagi Hasil Pajak merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan pelaksanaan perimbangan.

Berikut ini gambaran penetapan alokasi Bagi Hasil PKB dan BBNKB untuk Kabupaten/Kota :

Tabel 2. Persentase Pembagian Bagi Hasil (PKB) dan (BBNKB).

Ket.	Bagi an Kab/ Kota	PERHITUNGAN BAGIAN BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA			
		70% Berdasar kan Potensi	30% Sisa dibagi rata	Penerim aan Bersih Setahun	Peneri maan Perbul an
PKB	(1)	(2) = (1) x 70%	(3) = {Σ(1)- Σ(2)}x3 0%	(4) = (2)+(3)	(5) = (4)/12
BBN KB	(1)	(2) = (1) x 80%	(3) = {Σ(1)- Σ(2)}x2 0%	(4) = (2)+(3)	(5) = (4)/12

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (2014).

Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah dukungan, sumbangan dalam bentuk ide, tenaga, ataupun benda). Dalam bahasa Inggris, *contribus atau countribution* artinya menyumbang. Dapat diartikan pula kontribusi merupakan dukungan yang diberikan kepada pihak atau perkumpulan untuk mencapai tujuan akhir yang merupakan suatu cerminan seberapa besar bentuk dukungan diterima.

Kontribusi Bagi Hasil PKB serta BBNKB terhadap dana pembangunan dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{PKB Tahun } x}{\text{Belanja Modal Tahun } x} \times 100\%$$

Sumber : Wulandari (2009 : 4)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{BBNKB Tahun } x}{\text{Belanja Modal Tahun } x} \times 100\%$$

Sumber : Wulandari (2009 : 5)

Dana Pembangunan Daerah

Pembangunan adalah proses pembangunan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Indikator pembangunan merupakan petunjuk untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu. Menurut Kuncoro (1997: 19) indikator-indikator kunci pembangunan secara garis besar pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi :

- 1. Indikator Ekonomi;
- 2. Indikator Sosial.

Pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan pembangunan yang baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya (Pasolong, 2012: 69).

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Kontribusi Bagi Hasil PKB serta BBNKB di Kota Malang yang meliputi :
  - a. Realisasi dan target.
  - b. Tingkat pertumbuhannya
  - c. Tingkat ketergantungan daerah.
- 2. Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil PKB serta BBNKB untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang.

Penelitian ini berlokasi di Kota Malang. Lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan Bagi Hasil sektor PKB dan BBNKB yang diperoleh dari Provinsi cenderung mengalami peningkatan dan penurunan ditahun tertentu pada kurun waktu 2010-2014.

Analisis data yang yang pilih adalah analisis deskriptif yang bermaksud untuk menggambarkan serta memberikan penjelasan atas data yang telah didapat lainnya (Pasolong,

2012: 69). Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Kontribusi Dana Bagi Hasil PKB serta BBNKB yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Menganalisis realisasi dan target selama periode tahun 2010-2014.

$$\frac{\text{Realisasi PKB Tahun } x}{\text{Target PKB Tahun } x} \times 100\%$$

Sumber : Maharani (2014 : 7)

$$\frac{\text{Realisasi BBNKB Tahun } x}{\text{Target BBNKB Tahun } x} \times 100\%$$

Sumber : Maharani (2014 : 7)

- b. Menganalisis tingkat pertumbuhannya selama periode tahun 2010-2014.

$$r_{(PKB)} = \frac{P_{t(PKB)} - (P_{t-1(PKB)})}{P_{t-1(PKB)}} \times 100\%$$

Sumber : Wahyuni (2009 : 6)

$$r_{(BBNKB)} = \frac{P_{t(BBNKB)} - (P_{t-1(BBNKB)})}{P_{t-1(BBNKB)}} \times 100\%$$

Sumber : Wahyuni (2009 : 6)

Ket :

- r : Prtumbuhan
- Pt : Total penerimaan
- Pt-1 : Total penerimaan tahun Sebelumnya.

- c. Menganalisis tingkat ketergantungannya selama periode tahun 2010-2014.

$$\frac{\text{Bagi Hasil PKB Tahun } x}{\text{Total DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda Tahun } x} \times 100\%$$

Sumber : Wulandari (2009 : 8)

$$\frac{\text{Bagi Hasil BBNKB Tahun } x}{\text{Total DBH Pajak dari Provinsi dan Pemda Tahun } x} \times 100\%$$

Sumber : Wulandari (2009 : 8)

Kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Ketergantungan.

Persentase Bagi Hasil PKB dan BBNKB terhadap total pendapatan daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 15,00	Rendah
15,01 – 20,00	Sedang
20,01 – 25,00	Cukup
25,01 – 30,00	Tinggi
>30,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri (2015).

- 2. Analisis kontribusi Bagi Hasil PKB serta BBNKB untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang selama periode tahun 2010-2014.

$$\frac{\text{PKB Tahun } x}{\text{Belanja Modal Kota Malang Tahun } x} \times 100\%$$

Sumber : Wulandari (2009 : 4)

$$\frac{\text{BBNKB Tahun } x}{\text{Belanja Modal Kota Malang Tahun } x} \times 100\%$$

Sumber : Wulandari (2009 : 5)

Setelah menghitung persentase tingkat ketergantungan tersebut maka akan dinilai menggunakan tabel kriteria tingkat kontribusi berikut ini :

Tabel 4. Kriteria Tingkat Kontribusi.

Persentase	Kriteria
0,00% -2%	Sangat Kurang
2,01% - 4%	Kurang
4,01% - 6%	Sedang
8,01% - 10%	Cukup Baik
10,01% - 12%	Baik
>12%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kemendagri (2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Bagi Hasil Pajak (KB) dan Bea Balik Nama (KB) Kota Malang Tahun 2010-2014.

1. Analisis Realisasi dan Target

Analisis realisasi dan target Bagi Hasil ini untuk mngetahui apakah Pemerintah Kota Malang mencapai sasaran kinerja. Target dan realisasi PKB serta BBNKB Kota malang selama periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Target dan Realisasi PKB 2010-2014.

Tahun	Target	Realisasi	%
2010	Rp. 31.656.844.272	Rp. 42.026.989.666	133%
2011	Rp. 40.445.170.391	Rp. 29.680.291.144	73%
2012	Rp. 43.834.215.147	Rp. 53.190.971.687	121%
2013	Rp. 53.633.196.151	Rp. 40.068.051.532	75%
2014	Rp. 49.950.840.488	Rp. 59.573.861.821	119%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (2014).

Tabel 6. Target dan Realisasi BBNKB 2010-2014.

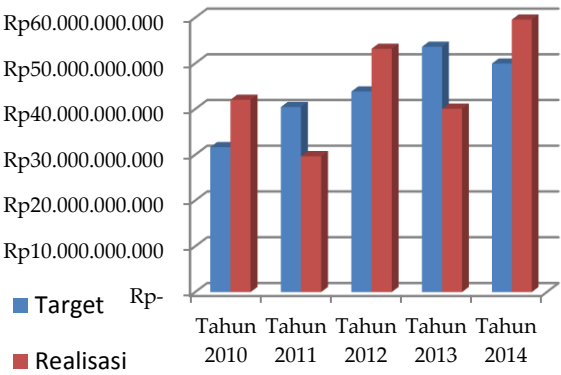
Tahun	Target	Realisasi	%
2010	Rp. 23.914.149.440	Rp. 26.675.560.571	111%
2011	Rp. 32.351.020.350	Rp. 21.511.263.352	66%
2012	Rp. 46.813.185.446	Rp. 29.797.468.282	64%
2013	Rp. 33.797.468.282	Rp. 37.986.052.946	112%
2014	Rp. 42.837.831.208	Rp. 53.233.946.429	124%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (2014).

Dari tabel 5 diatas dapat diketahui pada tahun 2010, 2012 dan 2014 PKB diatas target, sementara pada tahun 2011 dan 2013 realisasi dibawah target. Hal ini memperlihatkan bahwa selama periode tersebut penerimaan mengalami peningkatan serta penurunan.

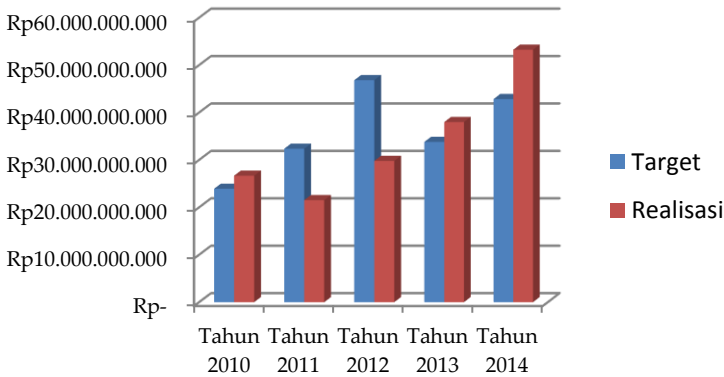
Dari tabel 6 terlihat bahwa BBNKB pada tahun 2010, 2013 dan 2014 diatas target, sementara di tahun 2011 dan 2012 dibawah target. Hal ini menunjukkan ada penurunan setelah meningkat dan pemkot Malang berhasil menaikkan kembali dengan dibuktikannya dengan tercapaian target di tahun selanjutnya.

Realisasi dan target PKB serta BNKB Kota malang dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Target dan realisasi PKB

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang



Tabel 2. Target dan Realisasi BBNKB

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang.

2. Analisis Laju Pertumbuhan

Menganalisis laju pertumbuhan Bagi Hasil PKB serta BBNKB Kota Malang memiliki tujuan untuk mengukur besar kemampuan Kota Malang mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan yang dicapai tiap periodenya.

Menghitung laju pertumbuhan PKB dan BBNKB menggunakan rumus yang telah ditentukan sebelumnya. Laju pertumbuhan tersebut selama periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Laju Pertumbuhan PKB tahun 2010-2014.

Thn	Target	Realisasi	(r)
2010	Rp. 31.656.844.272	Rp. 42.026.989.666	-
2011	Rp. 40.445.170.391	Rp. 29.680.291.144	-29,3%
2012	Rp. 43.834.215.147	Rp. 53.190.971.687	79,2%
2013	Rp. 53.633.196.151	Rp. 40.068.051.532	-24,7%
2014	Rp. 49.950.840.488	Rp. 59.573.861.821	48,7%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (2014).

Tabel 7. Laju Pertumbuhan BBNKB tahun 2010-2014.

Thn	Target	Realisasi	(r)
2010	Rp. 23.914.149.440	Rp. 26.675.560.571	-
2011	Rp. 32.351.020.350	Rp. 21.511.263.352	-19,3%
2012	Rp. 46.813.185.446	Rp. 29.797.468.282	38,5%
2013	Rp. 33.797.468.282	Rp. 37.986.052.946	27,5%
2014	Rp. 42.837.831.208	Rp. 53.233.946.429	40,1%

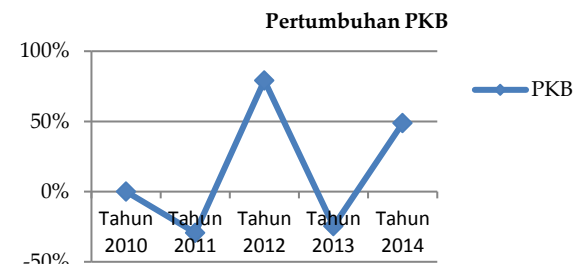
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (2014).

Dari tabel 7 terlihat PKB Kota Malang pada tahun 2011 dan 2013 menurun, sementara di tahun 2012 dan 2014 mengalami peningkatan pertumbuhan. Hal ini menunjukkan

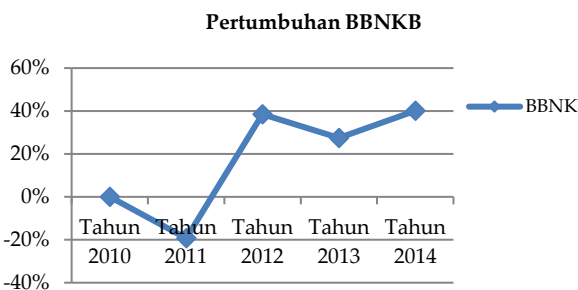
pertumbuhan naik turun selama periode yang ditentukan pada penelitian ini.

Dari tabel 8 terlihat BBNKB Kota Malang pada tahun 2012, 2013 dan 2014 mengalami peningkatan pertumbuhan, sementara di tahun 2011 mengalami penurunan. Hal ini memperlihatkan setelah menurun pemkot Malang dapat meningkatkan kembali penerimaannya jika dilihat dari pertumbuhannya.

Gambaran Laju pertumbuhan PKB serta BBNKB selama periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Laju Pertumbuhan PKB  
Sumber : Dinas pendapatan Kota Malang



Gambar 4. Laju Pertumbuhan BBNKB.  
Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang.

### 3. Analisis Tingkat Ketergantungan

Menganalisis ketergantungan keuangan daerah Kota Malang. Analisis ini memiliki tujuan mengetahui ketergantungan Keuangan Kota Malang terhadap PKB serta BBNKB.

Bagi Hasil PKB dan BBNKB serta Total Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Bagi Hasil Pajak (KB) dan Bea Balik Nama (KB) serta Total DBH Pajak 2010-2014.

Thn	PKB	BBNKB	Total DBH dari Provinsi dan Pemda
2010	Rp 42.026.989.666	Rp 26.675.560.571	Rp 89.300.667.042
2011	Rp 29.680.291.144	Rp 21.511.263.352	Rp 105.083.231.095
2012	Rp 53.190.971.687	Rp 29.797.468.282	Rp 101.924.277.971
2013	Rp 40.068.051.532	Rp 37.986.052.946	Rp 109.145.826.273
2014	Rp 59.573.861.821		Rp 154.505.481.231

Sumber : Dispenda dan BPKAD Kota Malang (2014).

Kriteria penilaian tingkat ketergantungan menggunakan tipe kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Perhitungan tingkat ketergantungan keuangan Kota Malang terhadap PKB serta BBNKB tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

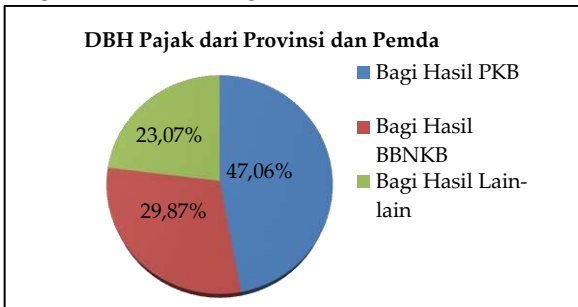
#### Tahun 2010

(PKB)  
 $\frac{\text{Rp } 42.026.989.666}{\text{Rp } 89.300.667.042} \times 100\% = 47,06\%$  (**Sangat Tinggi**)

(BBNKB)  
 $\frac{\text{Rp } 26.675.560.571}{\text{Rp } 89.300.667.042} \times 100\% = 29,87\%$  (**Tinggi**)

Terlihat di tahun 2010 tingkat ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi terhadap Bagi Hasil PKB di Kota Malang. PKB serta BBNKB ini di tahun 2010 dapat dipertimbangkan dalam hal penerimaan.

Tingkat ketergantungan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Tingkat Ketergantungan pada tahun 2010.

Sumber : Dispenda dan BPKAD Kota Malang.

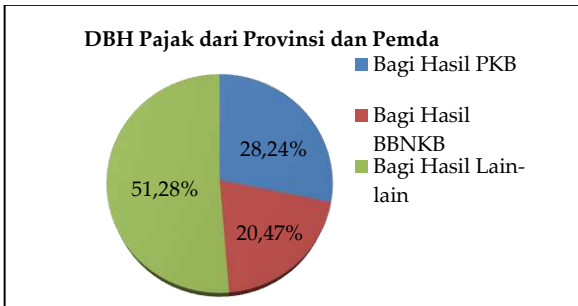
#### Tahun 2011

(PKB)  
 $\frac{\text{Rp } 29.680.291.144}{\text{Rp } 105.083.231.095} \times 100\% = 28,24\%$  (**Tinggi**)

(BBNKB)  
 $\frac{\text{Rp } 21.511.263.352}{\text{Rp } 105.083.231.095} \times 100\% = 20,47\%$  (**Cukup**)

Dapat terlihat di tahun 2011 ketergantungan keuangan Kota Malang terhadap PKB signifikan, sementara BBNKB hanya memberi penilaian cukup.

Tingkat ketergantungan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut :



Gambar 6. Tingkat Ketergantungan pada tahun 2011.

Sumber : Dispenda dan BPKAD Kota Malang.

#### Tahun 2012

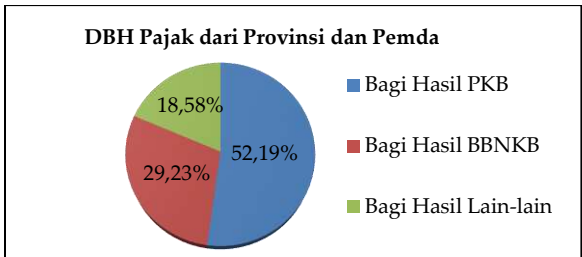
(PKB)



$$\frac{\text{Rp } 53.190.971.687}{\text{Rp } 101.924.277.971} \times 100\% = 52,19\% (\text{Sangat Tinggi})$$
  
(BBNKB)  
$$\frac{\text{Rp } 29.797.468.282}{\text{Rp } 101.924.277.971} \times 100\% = 29,23\% (\text{Tinggi})$$

Di tahun 2012 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungannya sangat signifikan terhadap keuangan Kota Malang. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam hal penerimaan yang diperoleh pemkot Malang.

Tingkat ketergantungan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut :



Gambar 7. Tingkat Ketergantungan pada tahun 2012.

Sumber : Dispenda dan BPKAD Kota Malang.

**Tahun 2013**

(PKB)

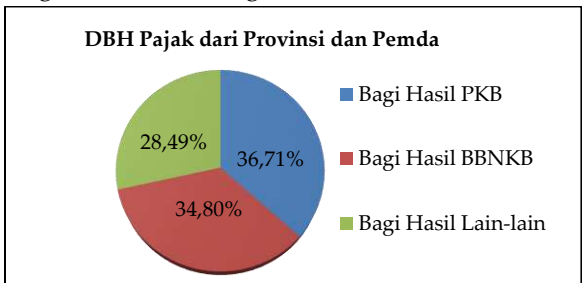
$$\frac{\text{Rp } 40.068.051.532}{\text{Rp } 109.145.826.273} \times 100\% = 36,71\% (\text{Sangat Tinggi})$$

(BBNKB)

$$\frac{\text{Rp } 37.986.052.946}{\text{Rp } 109.145.826.273} \times 100\% = 34,80\% (\text{Sangat Tinggi})$$

Di tahun 2013 tingkat ketergantungan lebih signifikan lagi dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa PKB serta BBNKB tersebut memang memberikan ketergantungan yang tinggi terhadap keuangan Kota Malang.

Tingkat ketergantungan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut :



Gambar 8. Tingkat Ketergantungan pada tahun 2013.

Sumber : Dispenda dan BPKAD Kota Malang.

**Tahun 2014**

(PKB)

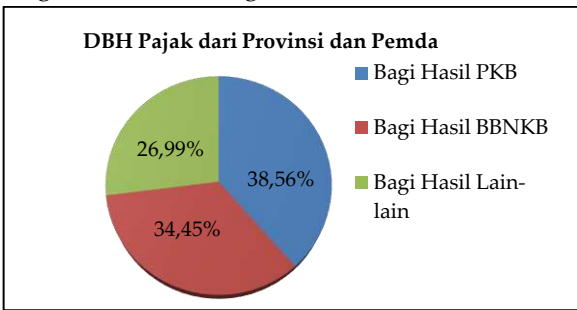
$$\frac{\text{Rp } 59.573.861.821}{\text{Rp } 154.505.481.231} \times 100\% = 38,56\% (\text{Sangat Tinggi})$$

(BBNKB)

$$\frac{\text{Rp } 53.233.946.429}{\text{Rp } 154.505.481.231} \times 100\% = 34,45\% (\text{Sangat Tinggi})$$

Sama halnya dengan tahun sebelumnya, PKB serta BBNKB tersebut memberikan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keuangan Kota Malang.

Tingkat ketergantungan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut :



Gambar 9. Tingkat Ketergantungan pada tahun 2014.

Sumber : Dispenda dan BPKAD Kota Malang.

**Kontribusi Bagi Hasil PKB dan BBNKB Untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2010-2014.**

Kontribusi pendapatan Bagi Hasil PKB serta BBNKB untuk Dana Pembangunan daerah dibandingkan dengan Belanja Modal. Bagi Hasil tersebut serta total Belanja Modal Kota Malang selama periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. PKB dan BBNKB serta Belanja Modal Kota Malang.

Tahun	PKB		Belanja Modal
		BBNKB	
2010	Rp 42.026.989.666		Rp 195.134.340.829
		Rp 26.675.560.571	
2011	Rp 29.680.291.144		Rp 160.178.926.241
		Rp 21.511.263.352	
2012	Rp 53.190.971.687		Rp 268.292.426.483
		Rp 29.797.468.282	
2013	Rp 40.068.051.532		Rp 353.264.833.758
		Rp 37.986.052.946	
2014	Rp 59.573.861.821		Rp 318.462.052.422
		Rp 53.233.946.429	

Sumber : Dispenda dan BPKAD Kota Malang (2014).

Hasil perhitungan analisis kontribusi PKB dan BBNKB disesuaikan dengan tabel kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini adalah perhitungan kontribusi PKB serta BBNKB ini untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang periode tahun 2010-2014 :

**Tahun 2010**

(PKB)

$$\frac{\text{Rp } 42.026.989.666}{\text{Rp } 195.134.340.829} \times 100\% = 21,54\% (\text{Sangat Baik})$$

(BBNKB)

$$\frac{\text{Rp } 26.675.560.571}{\text{Rp } 195.134.340.829} \times 100\% = 13,67\% (\text{Sangat Baik})$$

**Tahun 2011**

(PKB)

$$\frac{\text{Rp } 29.680.291.144}{\text{Rp } 160.178.926.241} \times 100\% = 18,53\% (\text{Sangat Baik})$$

(BBNKB)

$$\frac{\text{Rp } 21.511.263.352}{\text{Rp } 160.178.926.241} \times 100\% = 13,43\% (\text{Sangat Baik})$$

## Tahun 2012

(PKB)

$$\frac{\text{Rp } 53.190.971.687}{\text{Rp } 268.292.426.483} \times 100\% = 19,83\% \text{ (Sangat Baik)}$$

(BBNKB)

$$\frac{\text{Rp } 29.797.468.282}{\text{Rp } 268.292.426.483} \times 100\% = 11,11\% \text{ (Baik)}$$

## Tahun 2013

(PKB)

$$\frac{\text{Rp } 40.068.051.532}{\text{Rp } 353.264.833.758} \times 100\% = 11,34\% \text{ (Baik)}$$

(BBNKB)

$$\frac{\text{Rp } 37.986.052.946}{\text{Rp } 353.264.833.758} \times 100\% = 10,75\% \text{ (Baik)}$$

## Tahun 2014

(PKB)

$$\frac{\text{Rp } 59.573.861.821}{\text{Rp } 318.462.052.422} \times 100\% = 18,71\% \text{ (Sangat Baik)}$$

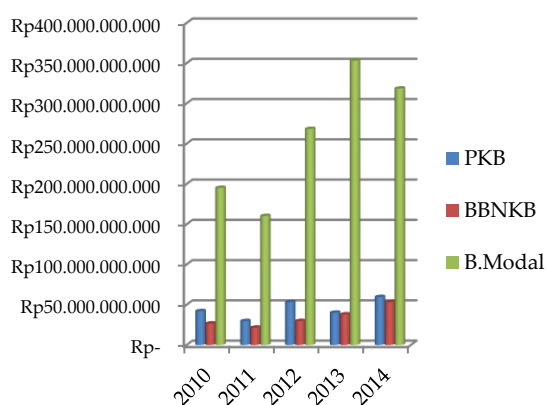
(BBNKB)

$$\frac{\text{Rp } 53.233.946.429}{\text{Rp } 318.462.052.422} \times 100\% = 16,72\% \text{ (Sangat Baik)}$$

Tingkat Kontribusi PKB selama 5 tahun dinilai sangat baik untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang meskipun di tahun 2013 dinilai baik karena di tahun tersebut pengeluaran Belanja Modal lebih tinggi dibanding tahun lainnya.

Tingkat Kontribusi BBNKB pada tahun 2010, 2011 dan 2014 dinilai sangat baik, sementara di tahun 2012 dan 2013 dinilai baik.

Tingkat Kontribusi PKB dan BBNKB untuk Dana Pembangunan Daerah periode tahun 2010-2014 disajikan dalam diagram adalah sebagai berikut :



**Gambar 10. Kontribusi Bagi Hasil PKB dan BBNKB terhadap Belanja Modal tahun 2010-2014.**

Sumber : Dispenda dan BPKAD Kota Malang (diolah).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Bagi Hasil PKB selama periode tahun 2010-2014 terdapat realisasi yang dibawah target yaitu ditahun 2011 dan 2013. BBNKB dibawah target pada tahun 2011 dan 2012

Pertumbuhan Bagi Hasil PKB meningkat ditahun 2010, 2012 dan 2014, dan menurun ditahun 2011 dan 2013. Pertumbuhan BBNKB menurun di tahun 2011 saja dan ditahun selanjutnya mengalami peningkatan.

Ketergantungan keuangan daerah terhadap Bagi Hasil PKB dinilai sangat tinggi di tahun 2010,2012,2013 dan 2014, serta di tahun 2011 dinilai tinggi. Ketergantungan terhadap BBNKB dinilai sangat tinggi di tahun 2013 dan 2014, dinilai tinggi di tahun 2010 dan 2012, serta dinilai cukup ditahun 2011.

Kontribusi Bagi Hasil PKB untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang dinilai Sangat Baik. Pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2014 dinilai sangat baik, sedangkan di tahun 2013 dinilai baik. Kontribusi BBNKB untuk dana Pembangunan Daerah pada tahun 2010,2011 dan 2014 dinilai sangat baik, sedangkan ditahun 2012 dan 2013 dinilai baik. Hal ini menunjukkan bahwa PKB dan BBNKB memberi dukungan yang sangat baik untuk Dana Pembangunan.

### Saran

1. Penetapan target Bagi Hasil PKB dan BBNKB sebaiknya direncanakan dengan baik agar tidak terjadi ketidak mampuan mencapai target. Dengan cara membandingkan target yg akan ditentukan terhadap pendapatan Bagi Hasil PKB dan BBNKB tahun-tahun sebelumnya serta membandingkan jumlah Subjek pajak tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
2. Pertumbuhan Bagi Hasil PKB serta BBNKB selama periode tahun 2010-2014 masih mengalami penurunan. Sebaiknya dilakukan pengawasan oleh pemerintah Kota Malang tentang sebab penurunan tersebut terjadi dengan cara meningkatkan komunikasi dengan pihak pemungut yaitu SAMSAT Provinsi di Kota Malang.
3. Melihat Kontribusi Bagi Hasil PKB serta BBNKB yang sangat tinggi sebaiknya pemerintah Kota Malang menalokasikannya secara khusus agar lebih terkonsentrasi pendanaan pembangunannya.
4. Transparansi atas Bagi Hasil PKB serta BBNKB Kota Malang sebaiknya ditingkatkan agar mendapat tingkat kepercayaan dan dukungan yang tinggi dari masyarakat dengan cara mensosialisasikan pentingnya membayar

Bagi Hasil PKB serta BBNKB dan menunjukkan perolehan pendapatan Bagi Hasil tersebut ditempat yang bisa di akses oleh masyarakat misalnya di *website* Pemkot Malang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. *"tentang pembagian dana bagi hasil pajak tahun 2014"*, diakses tanggal 25 Desember 2014 dari <http://www.dipendajatim.go.id/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. *"tentang arti kata Kontribusi"*, diakses pada 5 Desember 2015 dari <http://kbbi.web.id/>
- Kuncoro, M. 1997. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*. Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Pencetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Maharani, R. 2011. Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Kabupaten Kediri, *Jurnal Universitas Brawijaya*
- Pasolong, H. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No.246. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.5049. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Wahyuni. 2009. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah, *National Conference UKWMS*
- Wulandari, Y. 2009. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia, *Jurnal Universitas Negeri Padang*
- Wahyuni. 2009. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah, *National Conference UKWMS*